

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi

Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra

Program Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

e-mail: agungkresnandra@gmail.com

Abstract: *This study aimed to examine the effect of fiscal decentralization on local economic growth as well as view the ability of balance funds and private investment as a moderating variable, in strengthening the positive impact of fiscal decentralization on local economic growth in the province of Bali. The study was conducted in nine districts / municipalities in the province of Bali with a total sample of 45 samples. The data analysis techniques used in this study is partial least square (PLS). Hypothesis test results showed that only fiscal decentralization has a positive and significant impact on regional economic growth. Meanwhile, two moderating variables not proven to strengthen the positive effects of fiscal decentralization on economic growth in the region.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Local Economic Growth, Balance Funds, Private Investment*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menganalisis kemampuan dana perimbangan dan investasi swasta sebagai variabel moderasi, dalam hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali. Penelitian dilakukan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan total sampel sebanyak 45 sampel. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *partial least square* (PLS). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara, dana perimbangan dan investasi swasta tidak memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta

Sebagai negara berkembang, peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki banyak makna bagi Indonesia. Selain sebagai ukuran keberhasilan perekonomian, meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Maka dari itu isu melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan, merupakan peringatan bagi pemerintah yang harus segera disikapi, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah luas.

Jika berbicara tentang pertumbuhan ekonomi nasional, tentu tidak akan terlepas dari peran daerah sebagai penyumbang PDRB yang merupakan ukuran dari pertumbuhan ekonomi nasional. Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki potensi sumbangan PDRB yang cukup tinggi terutama dari sektor

pariwisatanya. PDRB Bali tumbuh dengan laju rata-rata 5,94 persen sama dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun demikian, laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidaklah konsisten terjadi di tiap tahunnya. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi Bali tidak konsisten tiap tahunnya. Salah satunya adalah masih rendahnya kinerja kapasitas fiskal di beberapa daerah di Bali. Berdasarkan teori federalisme fiskal, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur segala urusan di daerah, salah satu bentuknya adalah desentralisasi fiskal.

Hingga saat ini, isu desentralisasi fiskal selalu menjadi pembicaraan. Seringkali hasil-hasil riset terdahulu masih mendapatkan kesimpulan yang berbeda antar peneliti

desentralisasi fiskal, yang mana masing-masing pihak memiliki argumentasi logis serta telah membuktikannya secara empiris. Fadjar dan Sembiring (2007) merupakan salah satu peneliti yang mendukung dilakukannya desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua peneliti ini mendapatkan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal dan faktor *endowment* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, studi ini dilakukan pada 26 provinsi di Indonesia dari tahun 2000-2007. Berbeda halnya dengan Fadjar dan Sembiring, Situngkir, et al (2014) menemukan bahwa, desentralisasi fiskal dengan indikator pengeluaran dan pendapatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Adanya *research gap*, memiliki makna bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sekaligus bertentangan dengan penjelasan teori federalisme fiskal. Selain itu, perbedaan hasil riset terdahulu juga menyebabkan peneliti menduga bahwa, ada faktor kontingensi atau variabel lain (variabel moderasi), yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari beberapa variabel yang memang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dua diantaranya adalah dana perimbangan dan investasi swasta.

Walaupun penelitian terkait desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, namun masih sedikit yang memasukkan variabel moderasi ke dalam skema pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, perbedaan hasil penelitian terdahulu menyebabkan, penelitian terkait desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah masih belum konklusif, sehingga menarik untuk diteliti kembali pada latar tempat dan waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian:

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

- 1) Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali?

- 2) Apakah dana perimbangan memperkuat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali?
- 3) Apakah investasi swasta memperkuat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali.
- 2) Untuk menguji interaksi variabel moderasi dana perimbangan dalam memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali.
- 3) Untuk menguji interaksi variabel moderasi investasi swasta dalam memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Federalisme Fiskal

Teori Federalisme Fiskal merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek, Musgrave dan Oates. Dalam teori ini ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (otda).

Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal (kabupaten/kota) akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal/daerah dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi.

Teori Federalisme Fiskal memiliki dua perspektif teori yang menjelaskan tentang dampak ekonomi dari implementasi desentralisasi, yakni menurut *traditional theories (first generation theory)* dan *new perspective theories (second generation theories)*.

Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu Negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003), PDB dapat dipandang dalam dua hal. *Pertama*, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. *Kedua*, adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam konteks pembangunan daerah pendapatan perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam penelitian ini menggunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan.

Desentralisasi Fiskal

Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu Negara.

Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999):

1. Desentralisasi Politik
Desentralisasi politik merupakan sebuah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan
2. Desentralisasi Administrasi
Desentralisasi administrasi adalah sebuah pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan
3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006). Khusaini (2006) menyatakan bahwa dalam membahas desentralisasi fiskal, umunya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pengeluaran pembangunan, dan desentralisasi penerimaan.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip dan tujuan dari diberlakukannya desentralisasi fiskal, yaitu:

- 1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
- 3) Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
- 4) Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
- 5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah.

Belanja Modal

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan, sementara menurut Halim (2002:73), belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006, tanggal 3 April 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Lampiran I-A.3 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota, yang termasuk Belanja Modal adalah : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik (Wijaya, 2005:33). Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.

Alasan dipilihnya dana perimbangan sebagai salah satu variabel moderasi dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil-hasil riset terdahulu, diantaranya oleh Hidayat dan Sirojuzilan (2006), Setiyawati dan Hamzah (2007), Sihite (2010), Riska dkk. (2012), serta Najiah (2013), yang melihat pengaruh langsung dana perimbangan (DAU dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa dana perimbangan memang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini semakin menguatkan dugaan peneliti bahwa, dana perimbangan dapat menjadi sebuah variabel moderasi yang mampu memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Jenis Investasi

Dalam kamus ekonomi yang disusun oleh Winardi (1992), dikemukakan bahwa dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat-alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual), dengan modal berupa uang. Sedangkan secara makro, investasi berarti jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambah stok modal dalam periode tertentu (Nanga, 2005). Menurut Halim (2005:1), investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang datang. Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi netto).

Tendelilin (2010) mengungkapkan tiga alasan mengapa investor melakukan investasi, yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang.

- 2) Mengurangi tekanan inflasi.
- 3) Dorongan menghemat pajak.

Jenis-jenis investasi secara umum di dalam pembangunan ekonomi terdapat empat jenis investasi, yaitu:

- 1) Investasi Otonom dan Investasi yang Terdorong
- 2) *Publik Investment* dan *Private Investment*.
- 3) *Domestic Investment* dan *Foreign Investment*.
- 4) *Gross Investment* dan *Net Investment*.

Investasi Swasta Berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

PMDN adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Sementara PMA adalah kegiatan investasi yang hanya meliputi penanaman asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pemilik modal secara langsung menanggung resiko.

Penelitian ini menggunakan investasi swasta dengan dua indikator yaitu PMDN dan PMA sebagai variabel moderasi dengan beberapa alasan yaitu: 1) Inkonsistensi penelitian terdahulu terkait pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 2) Hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Raharjo (2006) dan Rustiono (2008) menemukan bahwa investasi swasta secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini menguatkan dugaan peneliti bahwa variabel investasi swasta nantinya akan mampu memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 3) Provinsi Bali yang merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di dunia tentunya akan banyak menarik minat tidak hanya wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali, tetapi juga para investor yang ingin menanamkan modalnya di Bali. Maka investasi swasta baik berupa PMDN maupun PMA sangat memungkinkan untuk dilakukan di Provinsi Bali. Tentu hal ini juga menjadi pertimbangan peneliti dalam memasukan investasi swasta berupa PMDN dan PMA sebagai variabel moderasi.

Kerangka Konseptual Dan Hipotesis

Berdasarkan teori federalisme fiskal, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dan digandakan kecepatannya dengan cara memberikan kewenangan kepada daerah yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (desentralisasi) dimana salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Keuntungan alokatif yang dimiliki oleh pemerintah daerah akibat desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah lebih baik dalam mengambil kebijakan terkait pelayanan publik di daerah jika dibandingkan dengan sistem yang tersentralisasi dimana semua kebijakan diambil oleh pusat. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di daerah. Dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar, daerah nantinya akan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait keuangan publik, pemerintah daerah tentunya memiliki informasi yang lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik akan lebih tepat daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat (Suaryana, 2010). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Oates (1972) yang berpendapat bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi.

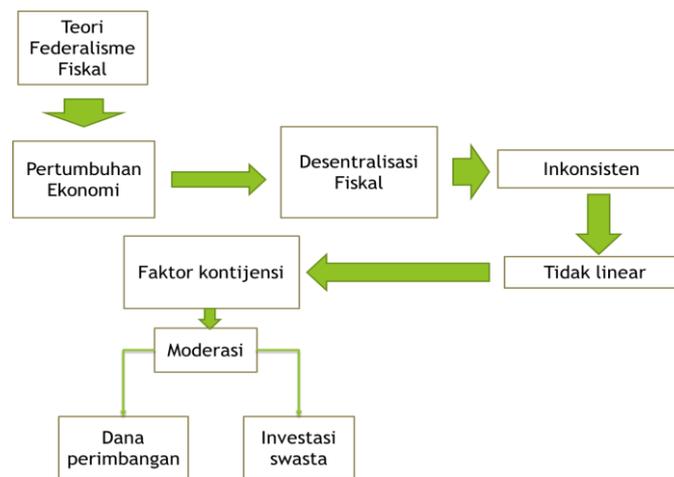
Dua indikator dalam desentralisasi fiskal baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pembangunan daerah menjadi tolak ukur keberhasilan dari desentralisasi fiskal di daerah. Secara teori, peningkatan pada kedua indikator tersebut akan turut memengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tidak selamanya peningkatan kedua indikator desentralisasi fiskal tersebut serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah atau

pengaruhnya tidak selalu linear. Hal ini juga didukung oleh hasil-hasil riset empiris terdahulu yang masih inkonsisten, ditambah fenomena yang terjadi di Provinsi Bali bahwa, peningkatan desentralisasi fiskal misalnya saja PAD, tidak serta merta membawa konsistensi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti dalam dugaan adanya faktor kontinjensi yang bisa memperkuat pengaruh positif peningkatan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan dari beragam faktor, dua diantaranya adalah dana perimbangan dan investasi swasta.

Tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk bisa mewujudkan suatu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah walaupun telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam bentuk desentralisasi fiskal. Ini merupakan fakta yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan perlu adanya bantuan lain, di luar kemampuan daerah dalam menciptakan sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber pertama tentunya dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan baik DAU maupun DAK. Sumber lainnya tidak berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, akan tetapi bersumber dari pihak swasta di luar pemerintahan berupa investasi swasta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kontinjensi dengan memasukkan dua variabel moderasi ke dalam model penelitian desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai penelitian yang menggunakan pendekatan kontinjensi dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontinjensi yang memengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya sehingga peneliti berkesimpulan bahwa ada variabel lain yang memengaruhinya. Govindarajan (1986) dalam Husnatarina dan Nor (2007) mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari hasil temuan tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi (*Contingency Approach*). Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mencoba untuk menggunakan dana perimbangan (DAU dan DAK) dan investasi swasta (PMA dan PMDN) sebagai variabel moderasi, karena kuat dugaan bahwa kedua variabel tersebut mampu meningkatkan pengaruh positif peningkatan kedua indikator desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Bali. Adapun alur pemikiran teoritis secara ringkas dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



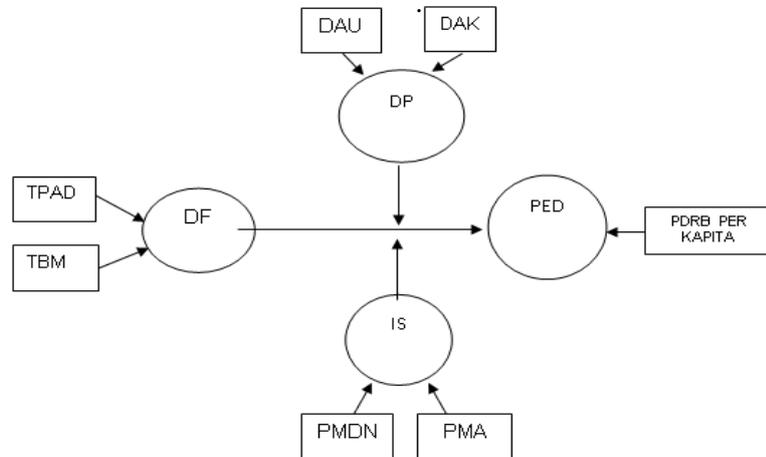
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan, penelitian ini akan melakukan dua tahap pengujian hipotesis. Tahap pertama yaitu menguji pengaruh langsung kedua indikator desentralisasi fiskal (penerimaan dan

pengeluaran pembangunan daerah) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tahap kedua dilakukan untuk menguji pengaruh interaksi antara variabel moderasi berupa dana transfer dan investasi swasta dengan variabel

independen berupa desentralisasi fiskal terhadap variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi daerah. Secara sistematis hubungan antara desentralisasi

fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah beserta interaksi variabel moderasi dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2 Kerangka Penelitian

Keterangan:

- DF : Desentralisasi Fiskal
- TPAD : Penerimaan Daerah
- TBM : Pengeluaran Pembangunan Daerah
- DP : Dana Perimbangan
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- IS : Investasi Swasta
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- PMA : Penanaman Modal Asing
- PED : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hipotesis

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari tiga hipotesis, dimana hipotesis pertama untuk menguji pengaruh langsung kedua indikator desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebelum berinteraksi dengan variabel moderasi. Hipotesis kedua dan ketiga untuk menguji pengaruh interaksi variabel dependen penerimaan dan pengeluaran daerah dengan variabel moderasi dana perimbangan dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

H₁: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

H₂: Dana perimbangan memperkuat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

H₃: Investasi swasta memperkuat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode kuantitatif. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Indriantoro dan Supomo (2013:12) mengenai penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2003: 11), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple jenuh dimana sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah data keuangan berupa PAD, belanja modal, total penerimaan dan belanja daerah, dana transfer berupa DAU dan DAK pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kurun waktu lima tahun (2009-2013) di sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali. Selain itu sampel dalam penelitian ini juga meliputi data realisasi investasi swasta berupa PMA dan PMDN dan juga pertumbuhan ekonomi berupa PDRB di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali kurun waktu lima tahun dari tahun 2009-2013.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data menurut sifatnya yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif. Sementara sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dianggap reliabel dan valid, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan melalui kegiatan dokumentasi (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data keuangan APBD Provinsi Bali dan realisasinya termasuk di dalamnya alokasi belanja modal, PAD dan penerimaan daerah, serta dana perimbangan termasuk DAU dan DAK. Selanjutnya, data keuangan APBN dan realisasinya termasuk di dalamnya total pengeluaran pembangunan (belanja modal) pemerintah pusat. Selain itu data lainnya didapat dari laporan PDRB Provinsi Bali termasuk di dalamnya PDRB per Kapita dan juga data mengenai investasi swasta Provinsi Bali.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui strategi arsip, yaitu data dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada. Karena sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder maka digunakan teknik pengumpulan data dari basis data yang dipublikasi. Adapun data publikasi yang dimaksud antara lain dokumen yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Badan Pemeriksaan Keuangan

Daerah (BPKD) Provinsi Bali dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.

Identifikasi, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel laten beserta variabel manifestnya dan juga satu variabel moderasi, secara detail dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Variabel Laten:

Variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dalam terminology SEM disebut variabel laten atau konstruk yang harus diukur dengan indikator atau manifest (Sholihin, 2013: 5). Variabel laten dalam penelitian ini dibagi atas variabel laten endogen dan eksogen. Masing masing dari variabel laten memiliki indikator atau variabel manifestnya.

a. Variabel laten endogen/terikat dan variabel manifestnya:

Variabel laten endogen merupakan variabel laten yang nilainya ditentukan oleh variabel lain di dalam model (Solihin, 2013: 5). Variabel laten endogen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PED) yang memiliki indikator atau variabel manifest berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

b. Variabel laten eksogen/bebas dan variabel manifestnya:

Variabel laten eksogen merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain di luar model (Sholihin, 2013:5). Variabel laten eksogen dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal yang memiliki dua indikator atau variabel manifest yaitu penerimaan daerah berupa rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (TPAD) dan pengeluaran pembangunan daerah berupa rasio belanja pembangunan/modal pemerintah daerah terhadap total belanja pembangunan/modal pemerintah pusat (TBM).

2) Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel independen yang berfungsi menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Lie Liana, 2009). Variabel moderasi dalam penelitian

ini adalah Dana Perimbangan berupa DAU dan DAK serta investasi swasta berupa investasi swasta berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menghindari perbedaan pengertian dan memberikan batasan yang tegas pada variabel yang diteliti, maka definisi operasional terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y)

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Kuznets dalam Jhingan, 2004). Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, maka parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB Per Kapita menurut harga konstan. PDRB per kapita dihitung dengan cara total PDRB masing-masing kabupaten/kota provinsi Bali dibagi dengan jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten/kota provinsi Bali. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi daerah disingkat PED dan indikatornya disingkat PDRB Per Kapita.

2) Desentralisasi Fiskal (X1)

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam skema yang dijelaskan oleh teori federalisme fiskal. Menurut Khusaini (2006), keberhasilan desentralisasi fiskal dapat diukur dari parameter penerimaan dan pengeluaran masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka, desentralisasi fiskal dalam penelitian memiliki dua indikator atau manifest yang berbentuk reflektif, yaitu dari sisi penerimaan pemerintah daerah (X1.1) dan dari sisi pengeluaran pemerintah daerah

(X1.2). Desentralisasi fiskal selanjutnya disingkat DF dalam penelitian ini. Untuk pengukuran dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Indikator Penerimaan Daerah (X1.1)

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah (Philips dan Woller, 1997). Indikator dalam penelitian ini diukur dengan cara membagi total PAD masing-masing kabupaten/kota provinsi Bali dengan total penerimaan daerah masing-masing kabupaten/kota provinsi Bali. Dalam penelitian ini indikator penerimaan daerah disingkat dengan TPAD.

b. Indikator Pengeluaran Pembangunan Daerah (X1.2)

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Dalam penelitian indikator pengeluaran pembangunan diukur dengan cara membagi total belanja modal masing-masing kabupaten/kota provinsi Bali dengan total belanja daerahnya. Dalam penelitian ini indikator pengeluaran pembangunan daerah disingkat dengan TBM.

3) Dana Perimbangan (X2)

Dana perimbangan (DP), adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sumber pendanaan dana perimbangan yang terdiri dari dua indikator berbentuk reflektif yaitu DAU (X2.1) dan DAK (X2.2) di Provinsi Bali.

a. Indikator Dana Alokasi Umum (X2.1)

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran

DAU secara nasional. Formula DAU per daerah rumusnya adalah:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Dalam penelitian ini, nilai DAU yang digunakan sudah dalam bentuk nilai absolut yang tercantum dalam laporan realisasi APBD Provinsi Bali dari tahun 2009-2013.

- b. Indikator Dana Alokasi Khusus (X2.2)
Menurut Poesoro (2008), penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD dari tahun 2009-2013.

4) Investasi Swasta (X3)

Adapun investasi swasta dalam penelitian ini menggunakan total realisasi investasi swasta baik PMA maupun PMDN masing-masing kabupaten/kota provinsi Bali.

- a. Indikator Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X3.1)

Investasi swasta berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau *domestic investment*, merupakan jenis investasi swasta dimana sumber pendanaannya berasal dari warga dalam negeri atau masyarakat yang secara sah menjadi warga negara Indonesia baik secara individu maupun berkelompok. Nilai PMDN dalam penelitian ini menggunakan nilai atau angka yang tercantum pada realisasi PMDN dari tahun 2009-2013 di Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- b. Indikator Penanaman Modal Asing (PMA) (X3.2)

Investasi swasta berupa penanaman modal asing (PMA) atau *foreign investment*, merupakan jenis investasi

swasta dimana arus modal berasal dari pihak asing di luar Negara Republik Indonesia baik individu maupun kelompok. Menurut Undang-undang PMA No. 1 tahun 1967, pengertian penanaman modal hanya meliputi penanaman asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pemilik modal secara langsung menanggung resiko. Nilai PMA dalam penelitian ini menggunakan angka atau nilai yang tercantum dalam realisasi PMA dari tahun 2009-2013 di sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Partial Least Squares (PLS) dalam menganalisis data penelitian. PLS merupakan salah satu metode SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, contohnya ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (*missing values*) dan multikolenieritas (Hartono dan Abdillah, 2009:11).

Lebih lanjut, Hartono dan Abdillah (2009:16) mengungkapkan beberapa keunggulan dari penggunaan PLS. Keunggulannya adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi yang dihasilkan oleh PLS lebih efisien dan mudah diinterpretasikan terutama pada model yang kompleks.
- 2) Dapat dijalankan dengan sampel yang sedikit.
- 3) Dapat menguji model penelitian dengan dasar teori yang lemah
- 4) Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan independen (model yang kompleks).
- 5) Mampu mengelola masalah multikoleniaritas antar variabel independen.
- 6) Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang.
- 7) Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis *crossproduct* yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi.
- 8) Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif.
- 9) Tidak mensyaratkan data berdistribusi

normal.

- 10) Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal, ordinal dan kontinu.

Tahapan dalam Menggunakan Analisis PLS

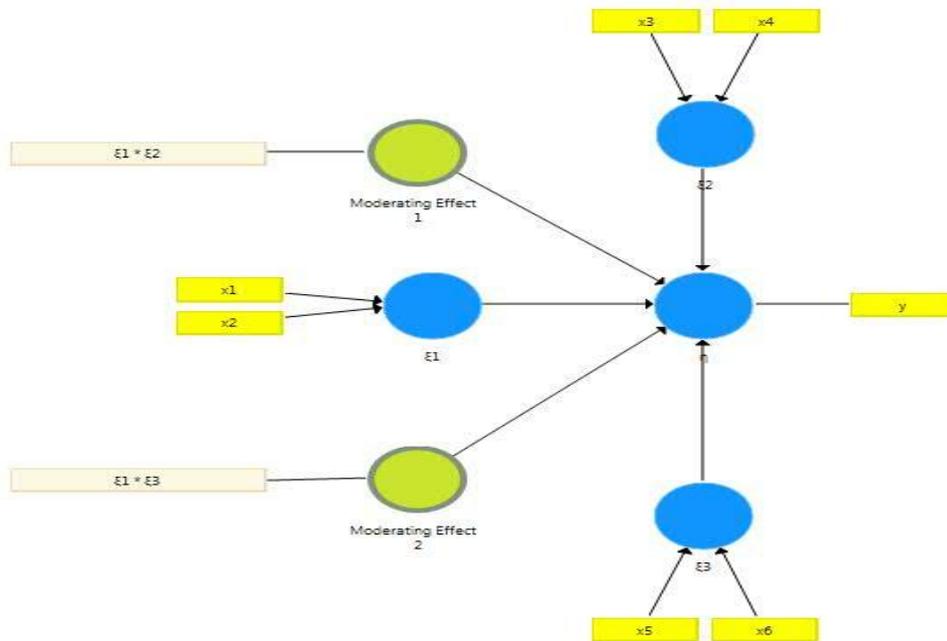
Menurut Ghazali dan Lathan (2012), tahapan analisis menggunakan PLS setidaknya harus melalui lima proses tahapan dimana setiap tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- 1) Konseptualisasi Model
 - a. Merancang inner model.
 - b. Merancang outer model
- 2) Menentukan Metode Analisis Alogirthm
- 3) Menentukan Metode *Resampling*

Umumnya terdapat dua metode yang digunakan oleh peneliti di bidang SEM untuk melakukan proses penyampelan kembali yaitu *bootstrapping* dan *jackknifing*. Dalam penelitian ini, metode *resampling* yang digunakan adalah metode *bootstrapping* karena metode *resampling* ini lebih umum digunakan dalam model persamaan struktural.

4) Menggambar Diagram Jalur

Setelah melakukan konseptualisasi model, langkah berikutnya adalah menggambar diagram jalur dari model yang akan diestimasi tersebut. Adapun gambar diagram jalur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Konstruk Diagram Jalur

5) Evaluasi Model

Model evaluasi PLS dilakukan dengan menilai *outer dan inner model*. Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Karena dalam penelitian ini *outer model* berbentuk reflektif, maka evaluasi yang dilakukan yaitu:

a. *Outer model*

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model.

- *Convergent validity*

Nilai *loading factor* >0,70 serta Nilai *Average Variance Extracted (AVE)* >0,50

- *Discriminant validity*

Korelasi konstruk dengan item pengukuran harus lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya dan nilai *Cross loading* harus >0,70.

- *Composite reliability*

Nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas komposit (pc) adalah > 0,7 .

b. *Inner model*

Evaluasi model struktural atau *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel laten. *Inner Model* dievaluasi dengan melihat besarnya presentase *variance* yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai *R-Square* (Latan dan Ghozali, 2013: 77). Menurut Hair (2011) dalam Latan dan Ghozali (2013: 85), nilai *R-Square* 0,75 ,0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, menengah atau moderate dan lemah. Sementara menurut Chin (1998) dalam Latan dan Ghozali (2013: 85) nilai *R-Square* 0,67 ,0,33 dan 0,19 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah. Dalam penelitian ini, evaluasi model struktural menggunakan *rule of thumb* yang dikemukakan oleh Hair (2011).

Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian semuanya merupakan hipotesis yang telah diberi arah (*one tail*). Hartono dan Abdillah (2009:63) mengatakan bahwa hipotesis *one tail* signifikan

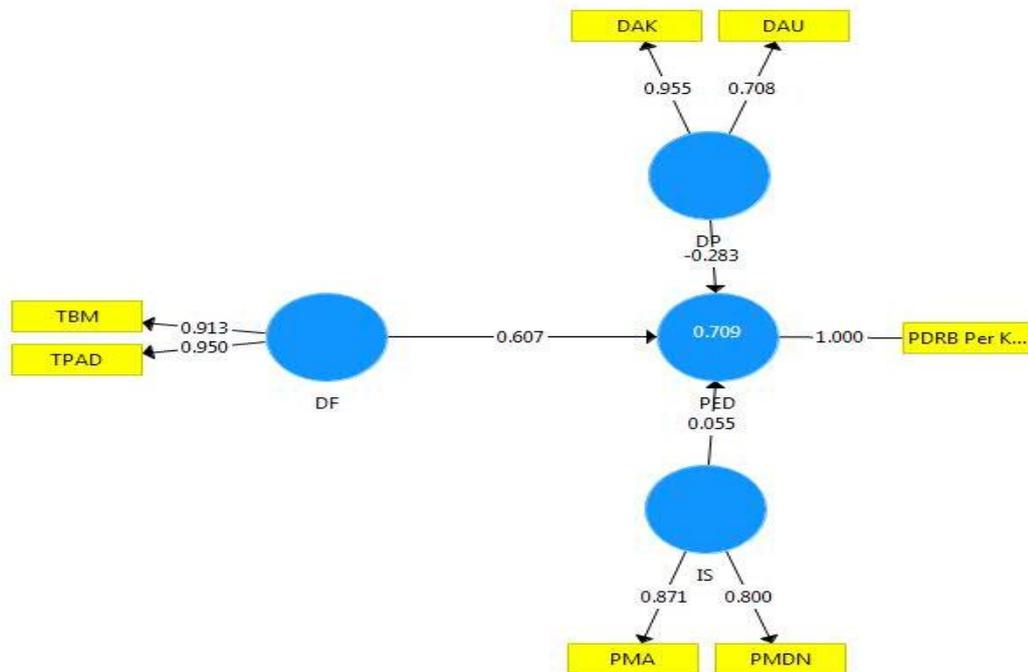
apabila nilai t-statistiknya lebih dari 1,64. Ketentuan diterimanya hipotesis alternatif atau hipotesis nol dalam penelitian ini bisa dilihat dibawah ini:

H_a = Diterima apabila nilai t-statistik lebih dari 1,64.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model

Sebelum melangkah pada pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan evaluasi model. Model evaluasi PLS dilakukan dengan menilai *outer model* dan *inner model* (Ghozali dan Latan, 2012) Untuk validitas konvergen dinilai dari *loading factor* >0,70 dan AVE serta *communality* >0,50. Menurut Chin (1998), Hair *et al.* (2011), Hair *et al.* (2012) dalam Latan dan Ghozali (2013: 81), terdapat tiga kriteria didalam penggunaan teknik analisis data dengan *SmartPLS* untuk menilai *outer model* yaitu validitas konvergen (*convergent validity*), validitas diskriminan (*discriminant validity*), dan reliabilitas (*reliability*).



Gambar 4 Loading Factor Konstruk Berindikator Reflektif

Dari hasil *output* analisis yang ditampilkan pada Gambar 5.1, dapat dilihat bahwa semua konstruk dengan indikator reflektif menghasilkan nilai *loading factor* lebih besar dari 0,70 yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah valid. Selain dengan melihat

nilai *loading factor*, evaluasi validitas konvergen juga dapat dilihat melalui nilai AVE. Dari hasil *output* analisis pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa semua konstruk menghasilkan nilai AVE di atas 0,50 sehingga memenuhi validitas konvergen.

Tabel 1 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
DF	0.868
DP	0.706
IS	0.700
PED	1.000

Sumber Data Primer Diolah: 2016

Setelah menilai validitas konvergen dari konstruk dengan indikator berbentuk reflektif, langkah selanjutnya adalah menilai validitas diskriminan. Hasil *output* analisis data yang disajikan pada Tabel 5.2 di bawah, mendapatkan nilai korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator tersebut dengan konstruk lainnya. Selain itu juga dapat dilihat bahwa

nilai *cross loading* dari setiap variabel telah memenuhi persyaratan, nilai *cross loading* harus lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa data pada Tabel 5.3 mencerminkan adanya *discriminant validity* yang baik.

Tabel 2 Nilai Cross Loading

	DF	DP	IS	PED
DAK	-0.57	0.95	-0.66	-0.69
DAU	-0.25	0.71	-0.14	-0.29
PDRB Per Kapita	0.80	-0.64	0.71	1.00
PMA	0.80	-0.44	0.87	0.65
PMDN	0.54	-0.53	0.80	0.53
TBM	0.91	-0.37	0.61	0.64
TPAD	0.95	-0.61	0.87	0.84

Sumber Data Primer Diolah: 2016

Setelah menilai validitas konvergen yang dilanjutkan dengan menilai validitas diskriminan dari konstruk, langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas model pengukuran atau *outer model* dengan melihat nilai *composite reliability*. Nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 barulah

konstruk dapat dikatakan reliabel atau telah memenuhi uji reliabilitas.

Nilai *composite reliability* yang dihasilkan semua konstruk pada **table 5.3** sangat baik yaitu di atas 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator adalah reliabel atau konstruk telah memenuhi kriteria uji reliabilitas.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

	Composite Reliability
DF	0.93
DP	0.82
IS	0.82
PED	1.00

Sumber Data Primer Diolah: 2016

Mengevaluasi Model Struktural (Inner Model)

Dalam mengevaluasi *inner model*, dimulai dengan melihat nilai *R-Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural (Latan dan Ghozali, 2013: 82).

Tabel 4 R-Square

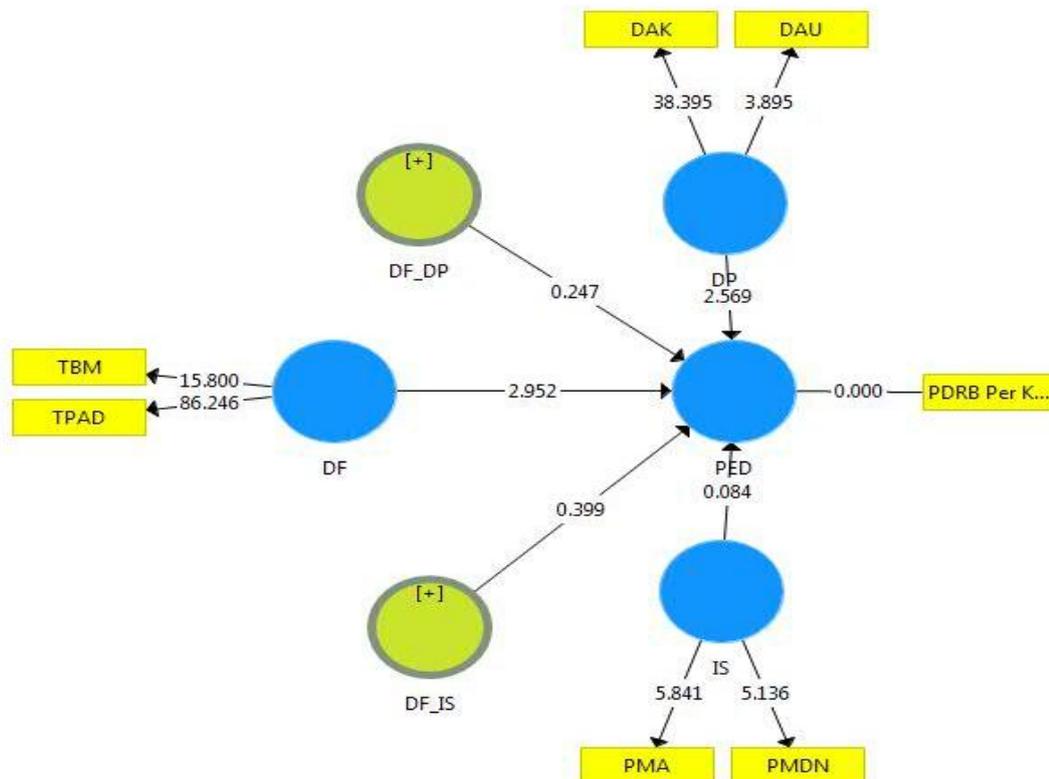
Variabel Endogen	R Square
PED	0.71

Sumber Data Primer Diolah: 2016

Hasil analisis data yang disajikan pada Tabel 5.4 di atas menunjukkan besarnya R-Square adalah 0,71 sehingga dapat disimpulkan bahwa model kuat. Nilai R-Square 0,71 dapat diartikan pula bahwa sebesar 71% varian dari variabel pertumbuhan ekonomi daerah (PED) dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal (DF), dana perimbangan (DP) dan investasi swasta (IS), sementara sekitar 29% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pengujian Hipotesis

Peneliti menggunakan tiga variabel eksogen dan satu variabel endogen yang secara rinci terdiri atas Desentralisasi Fiskal (DF) sebagai variabel independen, Dana Perimbangan (DP) dan Investasi Swasta (IS) sebagai variabel moderasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PED) sebagai variabel dependen. Keempat variabel tersebut memiliki indikator masing-masing. Model struktural hasil uji hipotesis menggunakan teknik *bootstrapping* dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini:



Gambar 5 Diagram Jalur Hasil Uji Hipotesis (Bootstrapping)

Koefisien path adalah koefisien yang menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis satu ekor (*one tailed*). Oleh karena itu,

hipotesis diterima jika nilai t statistik lebih besar dari 1,64. Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa hanya H1 yang diterima, sedangkan sisanya ditolak. Berikut hasil *path coefficients* dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5 Hasil Koefisien Jalur (*Path Coeficients*)

<u>Hipotesis</u>	<u>Konstruk</u>	<u>Original Sample (O)</u>	<u>T Statistiks (O/STERR)</u>	<u>Kesimpulan</u>
H1	DF -> PED	0,605	2,952	<u>Diterima</u>
H2	DF * DP -> PED	0,044	0,247	<u>Ditolak</u>
H3	DF * IS -> PED	0,051	0,399	<u>Ditolak</u>

Sumber Data Primer Diolah: 2016

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini mendukung hipotesis satu yaitu, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur sebesar 0.605 dengan nilai t-statistik 2.952 lebih besar dari nilai t Tabel 1,64 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan.

Hasil pengujian empiris ini sekaligus mendukung teori federalisme fiskal, bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat akselerasinya dengan jalan memberikan otonomi/kewenangan kepada daerah dimana desentralisasi fiskal termasuk di dalamnya. Hasil penelitian ini juga mendukung/konsisten dengan hasil penelitian Iimi (2005), Malik (2006), Akai dkk (2007) serta Fadjar dan Sembiring (2007).

Hasil pengujian hipotesis dua yaitu dana perimbangan memperkuat pengaruh positif desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.044 dengan nilai t-statistik sebesar 0.247. Nilai t statistik tersebut lebih kecil dari nilai t Tabel sebesar 1,64 atau dapat dikatakan tidak berpengaruh. Walaupun koefisien jalurnya bertanda positif namun secara statistik tidak signifikan maka hipotesis dua tidak didukung atau ditolak. Hal ini berarti dana perimbangan tidak memoderasi (memperkuat) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Sihite (2010), Prasetyono (2011) dan Prasetya (2011) yang menyimpulkan bahwa, dana perimbangan baik berupa DAU maupun DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi hasil ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan Setiyawati dan Hamzah (2007), Arifintar (2013), serta Hendriwiyanto (2014).

Interaksi dana perimbangan dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kemungkinan disebabkan oleh alokasi yang belum tepat sasaran. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan beberapa peneliti sebelumnya seperti Setiyawati dan Hamzah (2007), Arifintar (2013), serta Hendriwiyanto (2014), alokasi dana perimbangan baik berupa DAU maupun DAK, di lokasi ketiga peneliti tersebut melakukan penelitian memang tidak tepat sasaran.

Hasil pengujian hipotesis tiga yaitu investasi swasta memperkuat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.051 dengan nilai t-statistik sebesar 0.399 yang lebih kecil dari t-Tabel 1,64. Hal ini menunjukkan bahwa variabel investasi swasta tidak berhasil memoderasi (memperkuat) pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Walaupun koefisien jalurnya menunjukkan arah yang positif, namun karena tidak signifikan ($t \text{ statistik} < t \text{ Tabel}$) maka hipotesis tiga tidak didukung atau ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Raharjo (2006) yang menemukan bahwa investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Tandiawan dkk (2012), serta Hukubun, Rotinsulu dan Niode (2012). Peneliti-peneliti tersebut mendapatkan simpulan bahwa investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Utara.

Ketidakmampuan investasi swasta memoderasi (memperkuat) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, nilai realisasi investasi swasta yang

masih fluktuatif. Hal ini terbukti jika melihat perbandingan data realisasi investasi swasta (PMDN dan PMA) menurut lokasi tahun 2009 dengan tahun 2013 yang disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PMDN dan PMA Tahun 2009 dan 2013 (dalam miliar rupiah)

LOKASI	PMDN		PMA	
	2009	2013	2009	2013
Badung	28.3	3,126.3	1,968.5	3,021.2
Denpasar	22.5	2,932.8	58.8	95.4
Tabanan	-	108.9	3.6	331.9
Jembrana	-	80.3	22.1	1.4
Buleleng	-	201.7	6.4	60.5
Bangli	-	21.3	2.3	0.1
Klungkung	-	24.0	1.4	4.9
Gianyar	-	1,134.5	28.4	95.9
Karangasem	-	163.4	6.7	23.5

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2015

Penyebab yang kedua adalah, investasi swasta di Provinsi Bali masih belum merata dan hanya terpusat di daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal memadai dan mempunyai obyek-obyek wisata andalan seperti Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar. Jika dilihat pada Tabel 5.8, Kabupaten Badung pada tahun 2013 menyumbang 53,79% total investasi bagi Provinsi Bali, disusul Denpasar dengan 26,50% dan Gianyar di tempat ketiga dengan 10,77%. Jika dijumlahkan, ketiga daerah tersebut menyumbang sekitar 91% dari total investasi di Provinsi Bali. Fenomena ini menggambarkan bagaimana tidak meratanya arus investasi swasta yang masuk di Provinsi Bali. Praktis,

daerah-daerah seperti Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Klungkung dan Karangasem yang total investasinya di bawah dua digit, akan sangat sulit untuk mendapatkan tambahan modal ataupun dana dari arus investasi yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Nilai realisasi investasi swasta yang masih fluktuatif kemudian diperparah oleh fakta bahwa terjadi ketimpangan realisasi investasi swasta antar daerah di Bali menjadi faktor penyebab investasi swasta di Bali belum mampu memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Tabel 7 Total Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013

Lokasi	Total Investasi (dalam miliar Rupiah)	Persentase
Badung	6.147,50	53,79%
Denpasar	3.028,22	26,50%

Tabanan	440,84	3,86%
Jembrana	81,66	0,71%
Buleleng	262,21	2,29%
Bangli	21,39	0,19%
Klungkung	28,89	0,25%
Gianyar	1.230,39	10,77%
Karangasem	186,98	1,64%
BALI	11.428,09	100%

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2015

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan Iimi (2005), Malik dkk (2006), Akai dkk (2007) serta Fadjar dan Sembiring (2007) sekaligus mendukung teori federalisme fiskal yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai dengan cara desentralisasi yang salah satunya berbentuk desentralisasi fiskal.

Kedua, dana perimbangan memperlemah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini salah satunya disebabkan ketidaktepatan alokasi dana perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Bali. Alokasi dana perimbangan baik berupa DAU maupun DAK lebih banyak dihabiskan pada porsi belanja rutin dan proyek-proyek yang tidak memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga, investasi swasta tidak memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai realisasi investasi swasta yang masih fluktuatif di beberapa daerah di Provinsi Bali merupakan salah satu penyebab investasi swasta tidak memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali. Selain itu, ketidakmerataan arus investasi di Provinsi Bali menjadi penyebab lain atas ketidakmampuan investasi swasta dalam memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Keempat, walaupun dana perimbangan dan investasi swasta tidak memoderasi (memperkuat) pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Bali, hal tersebut tidak lantas menjadikan keduanya sebagai sesuatu yang tidak penting

dalam skema peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dana perimbangan dan investasi swasta masih tetap diperlukan bagi daerah, karena jika dilihat nilai *R-Square* yang ditunjukkan cukup besar yaitu 0,71 (71%) atau tergolong dalam model yang kuat. Nilai *R-Square* sebesar 71% memiliki arti bahwa dana perimbangan dan investasi swasta serta desentralisasi fiskal dapat menjelaskan varian pertumbuhan ekonomi daerah, sementara 29% sisanya di pengaruhi oleh variabel lain di luar model. Ini berarti pemerintah masih harus memasukan dana perimbangan dan investasi swasta dalam skema peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain: pertama, peneliti kesulitan untuk memperoleh data terbaru (*up to date*) khususnya untuk pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB per kapita. Data terakhir yang peneliti berhasil peroleh di BPS adalah data tahun 2013. Sementara untuk data PDRB per kapita tahun 2014 hanya tersedia sampai semester pertama dimana data tersebut masih bersifat estimasi dan belum final, sementara data tahun 2015 masih belum tersedia di BPS Provinsi Bali. Karena peneliti juga dibatasi oleh waktu yang tidak memungkinkan peneliti untuk menunggu lebih lama untuk data PDRB per kapita terbaru yang telah bersifat final. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data terbaru yaitu tahun 2014 dan 2015 sehingga lebih mencerminkan kondisi kekinian.

Saran bagi pemerintah daerah Provinsi Bali, hendaknya pemerintah daerah Provinsi Bali meningkatkan kinerja keuangan daerah terutama yang menjadi tolak ukur keberhasilan desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Bali hendaknya menetapkan capaian PAD sesuai

potensi riil yang dimiliki oleh Provinsi Bali bukan berdasarkan tingkat kemudahan untuk mencapainya. Terkait belanja daerah, pemerintah Provinsi Bali sebaiknya mengalokasikan lebih banyak pada porsi belanja modal terutama pada belanja infrastruktur yang telah terbukti berdasarkan hasil penelitian ini memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah pusat sebaiknya memberikan kriteria pengalokasian DAU walaupun tidak sama persis seperti kriteria pada alokasi DAK (sepenuhnya ditentukan pusat), agar pengalokasian DAU tidak hanya habis untuk membiayai belanja konsumsi pemerintah daerah seperti belanja gaji pegawai, melainkan dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.

Saran terkait investasi swasta untuk pemerintah daerah hendaknya mulai membuat pengaturan mengenai penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan hukum investasi. Pemerintah pusat maupun daerah juga sebaiknya memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor baik asing maupun lokal, meliputi perijinan investasi, imigrasi, kepabeanan, perpajakan dan pertahanan wilayah juga. Pemerintah daerah Provinsi Bali sebaiknya mulai melakukan pemerataan arus investasi yang masuk ke Bali

Untuk mewujudkan pemerataan investasi, maka pemerintah daerah hendaknya mulai merevitalisasi dan menambah sarana dan prasarana penunjang seperti infrastruktur jalan dan transportasi di kabupaten/kota yang sebelumnya tidak dilirik investor, agar investor tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Terakhir, pemerintah Provinsi Bali harus mulai berani mengevaluasi kinerja jajarannya terutama yang berkaitan dengan penanaman modal pihak swasta baik dalam negeri (PMDN), menghilangkan segala bentuk ketidakefisienan dan menindak tegas oknum-oknum yang menghambat proses masuknya investasi ke Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Akai, Nobuo, Yukihiko Nishimura, Masayo Sakata. 2007. *Complementarity, Fiscal Decentralization and Economic Growth, Economics of Governance*. Heidelberg: Sep 2007. Vol. 8, Iss. 4; p. 339.

Fadjar A. D dan Britany Alasen Sembiring. 2007. Efektifitas Faktor Input dan

Ketimpangan Pendapatan Daerah Di Indonesia Setelah Desentralisasi Fiskal. *Wibiz Economic Research Centre*.

- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2012. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 2.0 M3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Jawa Tengah.
- Halim, Abdul. 2002. Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *KOMPAK STIE: 127-146*. Yogyakarta.
- Hartono, J. dan W. Abdillah. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*. Andi. Yogyakarta.
- Hidayat, Paidi dan Sirojuzilan. 2006. Kajian Tentang Keuangan Daerah Kota Medan Era Otonomi Daerah Periode 2001-2005. *Jurnal Perencanaan dan pengembangan Wilayah*, Vol 2, No.1 Agustus
- Hidayat, Syarif. 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Rajawali Pers. Jakarta
- Hukubun, Mefi, Debby Rotinsulu dan Audie Niode. 2012. *Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002-2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Husnatarina, F dan Nor, W. 2007. *Pengaruh keterlibatan Pekerjaan dan Budget Impphasis dalam Hubungan atara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia, Depok:1-25. 7-9 November*.
- Iimi, Atsushi, 2005. Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note. *Journal of Urban Economics* 57.
- Jhingan, ML. 2004. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Khusaini, Muhammad Dr. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan*

- Pembangunan Daerah*. BPFE Universitas Brawijaya. Malang.
- Litvack, Jennie. 1999. *Decentralization*. World Bank. Washington DC.
- Malik, Shahnawaz. 2006. Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development Review*, 45: 4 part ii (Winter 2006).
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Najiah, Laeni. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap PDRB di Kota Depok Periode 2001-2010*. UIN Syarif Hidayatullah; Jakarta.
- Oates, W.E. 1972. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 46.
- Philip, Kerk dan Gary M. Woller. 1997. *Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth (An Empirical Investigation)*. The Journal of Development Studies, Vol.34 No.4, April
- Prasetyono, Pipin. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2001-2009)*.
- Presetya, Wawan. 2011. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Se-Jawa Bali Tahun 2006-2009)*.
- Raharjo, Adi. 2006. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Riska, A. A. I., Ahmidati, F. N., Lolowang, N. H., dan Anggraini, R. M. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Daerah Tahun 2008-2012*. <http://www.academia.edu/8095829/>
- Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Diakses Tanggal 28 November 2015.
- Rustiono, Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Jawa Tengah.
- Setyawati, Anis., dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur*. *Jurnal Akuntan dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2007, hal. 211-228.
- Sihite, Friska. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 2004-2007)*.
- Situngkir, Freddy, Sirojuzilam, Erlina, Agus Suriyadi. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Ekonomi* Vol.17 No.3 Juli 2014.
- Solihin, Mahfud., Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta: ANDI.
- Suaryana. 2010. *Pengaruh Moderasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Keserasian Belanja Daerah, dan Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Riset. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Udayana. Denpasar.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi*, Edisi Pertama. KANISIUS: Yogyakarta.
- Tandiawan, Elvandry, Amran Naukoko dan Patrick Wauran. 2012. *Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Wijaya, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Winardi. 1992. *Kamus Ekonomi*. Mandan Maju. Bandung.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di*

Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zhang Tao dan Zou Heng Fu. 1998. Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China. *Journal of Public Expenditure* 67, 221-240.